



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ISMET INONI
2. Jabatan : ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
3. NHK : 102026

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 138.000.000

1. Tanah Seluas 702 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 13.000.000
2. Tanah Seluas 15515 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 25.000.000
3. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 2.000.000
4. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 8.000.000
5. Tanah Seluas 7500 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 50.000.000
6. Tanah Seluas 5000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 10.000.000
7. Tanah Seluas 8000 m2 di KAB / KOTA LAMPUNG BARAT, WARISAN Rp. 30.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 230.000.000

1. MOTOR, HONDA T4G02131LO M/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
2. MOBIL, TOYOTA KIJANG INOVA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
3. MOTOR, HONDA HONDA BEAT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 12.500.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	76.710.487
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	457.210.487
III. HUTANG	Rp.	45.153.237
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	412.057.250

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.